

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud

**Alex T. Mala¹
Daud M. Liando²
Welly Waworundeng³**

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud . Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitain kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat dari kurang berperannya pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal,

Kata Kunci : Peran, LPM, Pembangunan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Tujuan dibentuknya LPM adalah sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut) dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kedudukan LPM baik di desa maupun di kelurahan bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri dan mempunyai LKMD/K mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan menembangkan pembangunan secara partisipatif
- c) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat
- d) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Program pembangunan dibatasi atas proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana yang ada di kelurahan. Pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diawali dari musyawarah yang dilakukan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bersama setiap kepala lingkungan yang dipelopori oleh pihak kelurahan sebagai pihak yang menjadi fasilitator pembangunan. Selanjutnya hasil musyawarah yang telah

dilakukan maka akan dibawa ke musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, dimana disini akan dibahas mengenai pembangunan kelurahan yang akan dibangun.

Dalam musyawarah yang akan dilakukan di kelurahan ini seluruh aspirasi yang ada akan dibahas. Selanjutnya dalam musyawarah ini akan dibahas pembangunan mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan nantinya, sehingga akan dapat menghindari pembangunan yang hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat yang mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendali pembangunan.

Masyarakat Kecamatan Lirung adalah masyarakat yang majemuk dalam hal agama, suku, lapisan sosial, dan tingkatan Pendidikan, Kecamatan Lirung secara geografis terletak di Pulau Salibabu, dan memiliki pembagian batas wilayah administratif yakni: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Moronge, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Salibabu, sebelah timur berbatasan dengan Ibukota Kabupaten Melonguane, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kalongan

Dalam pembangunan desa/kelurahan LPMD/K merupakan mitra kerja dari pemerintah desa/kelurahan. Pemerintah desa/kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa/kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa/lurah mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa/kelurahan dan unsur penyelenggara

pemerintahan desa/kelurahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Masalah yang mendesak untuk diselesaikan adalah bagaimana membangun kelurahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia sehingga bermanfaat bagi kelurahan. Upaya yang penting untuk dilakukan agar masyarakat Kelurahan mampu bertanggung jawab dan mengelola sumberdaya yang dimiliki adalah penumbuhan kapasitas organisasi lokal agar dapat menentukan kebutuhan, tujuan dan aspirasi serta mengambil kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kondisi hidupnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat, penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup, pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, dan pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Keberadaan organisasi lokal seperti LPM ini sangat diperlukan untuk menghindari eksese negatif dari pembangunan yang dilaksanakan secara top down. LPM juga merupakan lembaga otonomi di kelurahan yang diberi kewenangan oleh masyarakat

untuk merumuskan kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah Peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- 2) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swafaya masyarakat
- 3) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan menumbuhkembangkan pembangunan secara partisipatif

Informan penelitian ini diambil dari pihak-pihak yang berkompeten di Kecamatan Lirung, dan yang memiliki informasi tentang peranan LPM dalam pembangunan Kelurahan Lirung dan kelurahan Lirung I, yaitu Jumlah seluruh informan dalam penelitian sebanyak 10 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Camat Lirung :1 Orang
2. Lurah Lirung I : 1 Orang
3. Kepala LPM Lirung dan Kepala LPM Lirung I : 2 orang
4. Pengurus LPM Kelurahan Lirung dan Kelurahan Lirung I : 2 Orang
5. Lurah Lirung : 1 Orang
6. Tokoh masyarakat : 3 orang jumlah 10 orang

Dalam pengumpulan data dilapangan, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara mendalam
3. Dokumentasi

Hasil Penelitian

Komponen pertama yang dikaji untuk mengetahui peran LPMK adalah kemampuan dalam merencanakan pembangunan, kedua menggerakkan swadaya masyarakat dan ketiga melaksanakan dan menendalikan pembangunan, program yang dilaksanakan di atas, dapat dijelaskan bahwa keterlibatan LPMK dalam proses perencanaan program, hanya terlihat pada proses perencanaan program penguatan kelembagaan tingkat Kelurahan. Keterlibatan LPMK lebih pada bentuk keikutsertaan dalam setiap pertemuan yang diadakan untuk membahas rencana kegiatan, sedangkan dalam bentuk penyampaian gagasan, dan pikiran lebih didominasi oleh pemerintah Kelurahan. Keterlibatan pengurus LPMK juga tidak terlepas dari kedudukan organisasi LPMK sebagai penanggung jawab operasional pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, pada program pembangunan yang ada di Kelurahan Lirung dan Kelurahan Lirung I peran dan keterlibatan LPMK tidak nampak, tidak adanya inisiatif untuk menyusun proposal rencana pembangunan sarana yang diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten, berasal dari Kelurahan, penyusunan rencana kegiatan langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada dan ada keterlibatan dari LPMK. Penyusunan rencana kegiatan program pembangunan dilakukan langsung oleh masyarakat dan kepala lingkungan yang disesuaikan dengan pedoman umum yang ada, untuk

membantu masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan.

Sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam pembangunan, sebenarnya LPMK dapat berperan dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan. Sesuai dengan tugas pokoknya LPMK dapat memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan program maupun terlibat langsung dalam penyusunan program, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang merupakan swadaya murni masyarakat.

Peran Lembaga Pembudayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Yang Partisipatif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah "lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat, bukan prakarsa atau keinginan dari pemerintah atau Lurah, dan keberadaan LPMK ini juga dijadikan sebagai mitra kerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi serta kebutuhan dari masyarakat setempat khususnya aspirasi dan keinginan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan

Beberapa pernyataan yang berkaitan dengan peran LPMK dalam melaksanakan fungsi perencanaan

pembangunan dapat dikemukakan sebagai berikut: wawancara di rumah informan, yang adalah sebagai pengurus LPMK Kelurahan Lirung I, (jemi pulu) mengatakan:

"Keterlibatan kami sebagai pengurus LPMK dalam proses penyusunan rencana pembangunan kelurahan masih sangat kurang. kami hanya sekedar ikut sebagai peserta dalam setiap rapat yang diadakan untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan yang akan di laksanakan. Saya ikut pertemuan kalau diberitahu atau diundang " (wawancara 4 oktober 2021).

Senada dengan informan diatas, selaku pengurus LPMK Lirung I juga, mengemukakan:

"Memang belum ada program yang dilaksanakan di kelurahan ini yang merupakan program yang inisiatif pengusulannya berasal dari 3 pengurus LPMK. Pengurus LPMK hanya ikut dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk membahas suatu program, jika diundang untuk mengikuti suatu pertemuan. Program-program yang ada ini inisiatif pengusulannya lebih banyak datang dari pemerintah kelurahan" (wawancara 4 oktober 2021)

Agak berbeda dengan informasi di atas, ketua LPMK Kelurahan Lirung I, dalam wawancara dengan peneliti, mengatakan bahwa:

"Pengurus LPMK pernah terlibat secara aktif dalam dalam menyusun rencana kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan, Keterlibatan LPMK dalam program penguatan kelembagaan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. LPMK bersama pemerintah kelurahan terlibat secara berama-sama merumuskan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan salah satunya pembuatan bak sampah

beton untuk sampah organic di setiap rumah warga akan tetapi tidak terlaksana, karena tidak ada anggaran dari pihan manapun. (wawancara 4 oktober 2021)

Sementara itu Lurah Lirung ketika diwawancarai mengarakan bahwa:

"Dalam merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di kelurahan memang LPMK, diikuti sertakan dalam pengusulan pembangunan yang ada di kelurahan"(wawancara 4 oktober 2021)

Dalam hal penyampaian pendapat dalam pertemuan, partisipasi pengurus LPMK masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan berikut, yang merupakan masyarakat yang ada di Kelurahan lirung I mengemukakan, bahwa:

"Dalam pertemuan-pertemuan, yang lebih banyak mengemukakan pendapat adalah Lurah. Kami masyarakat walaupun sudah dibuka kesempatan untuk berdiskusi lebih banyak mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pihak penanggungjawab program. Masyarakat masih menganggap bahwa yang mengetahui berbagai permasalahan di kelurahan adalah lurah"(wawancara 5 oktober 2021)

Senada dengan pernyataan di atas, salah seorang tokoh masyarakat yang selalu ikut dalam kegiatankegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan mengemukakan bahwa:

"Peran lurah dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan masih sangat besar. Mungkin ini tidak tedepas dari kedudukan lurah, sehingga berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh lurah mas ih sangat menonjol di bandingkan dengan LPMK "(wawancara 5 oktober 2021)

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di kelurahan, inisiatifnya lebih banyak berasal dari lurah. Demikian pula dalam hal penyampaian gagasan dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan masih didominasi oleh pemerintah kelurahan.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menggerakkan Swadaya gotong Royong Masyarakat

Komponen kedua yang berkaitan dengan peran LPMK adalah kemampuan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan LPMK dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan dalam menggerakkan massa dan kesediaan dalam mengumpulkan dana. Dalam hal keterlibatan LPMK dalam menggerakkan massa terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa LPMK tidak terlibat dalam pengerahan massa dan pendapat kedua yang mengatakan bahwa LPMK terlibat dalam pengerahan massa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Informan Bapak Hermanto salehe selaku sekretaris LPMK dalam kesempatan wawancara, mengatakan bahwa:

"Kami pengurus LPMK akan ikut memberitahu kepada masyarakat untuk ikut dalam kegiatan yang akan dilaksanakan jika sebelumnya Lurah memberitahu kami untuk ikut menggerakkan masyarakat. Kalau tidak ada pemberitahuan, kami akan ikut dalam kegiatan itu sama seperti warga lainnya. Kalau kami tidak disuruh mengumpulkan masyarakat, Lurah melakukan sendiri tugas itu"(wawancara 5 oktober 2021)

Selanjutnya ketua LPMK dalam wawancara dengan peneliti, mengatakan bahwa:

"LPMK ikut menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong-royong baik itu ada permintaan dari Lurah maupun tidak ada. Kegiatan gotong-royong biasanya kami lakukan dalam kegiatan membersihkan lingkungan tempat tinggal dan tempat-tempat umum seperti jalan, bangunan pemerintah dan pembersihan lingkungan"(wawancara 5 oktober 2021)

Sisi lain dari kegiatan menggerakkan massa dalam pembangunan ditunjukan dengan kesediaan masyarakat mengumpulkan dana untuk kepentingan pembangunan. Salah satu informan selaku pengurus LPMK mengemukakan bahwa:

"Saya tidak berani mengorganisir masyarakat untuk mengumpulkan dana untuk menambah biaya yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pekerjaan itu biasanya dilaksanakan oleh lurah atau aparat kelurahan. Tapi kalau disuruh oleh lurah saya ikut juga bersama mereka untuk menghimpun dana masyarakat untuk kegiatan pembangunan"(wawancara 5 oktober 2021)

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa LPMK terlibat langsung menggerakkan swadaya masyarakat untuk kegiatan yang bersifat rutin seperti pembersihan lingkungan, muayawara perencanaan pembangunan (murembang). Sedangkan dalam pelaksanaan program pembangunan keterlibatan LPMK dalam menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat sangat tergantung kepada kebijakan lurah untuk melibatkan pengurus LPMK.

Berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, salah satu masyarakat kelurahan mengatakan bahwa:

“selama saya tinggal dan menjadi warga kelurahan lirung I, tidak pernah saya mendengar ada ajakan dari LPMK untuk kerja bakti, yang paling sering saya dengar ajakan dari pemerintah kelurahan, baik itu melalui kepala lingkungan, maupun lurah itu sendiri”(wawancara 6 oktober 2021)

Hal senada pula turut disampaikan oleh salah satu Kepala Lingkungan lirung I, yang mengatakan bahwa:

“selaku kepala lingkungan saya selalu memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pengeras suara, maupun pada sambutan acara-acara pesta maupun kedukaan, intinya masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga keamanan ketertiban umum”(wawancara 6 oktober 2021)

Masyarakat yang lainnya senada dengan pernyataan diatas, turut mengatakan bahwa:

“Saya tahu apabila dikelurahan ini ada pengurus LPMK, karena saya pernah mendengar ada LPMK dikelurahan ini, mereka juga pernah tampil dalam kegiatan-kegiatan di kelurahan, apabila LPMK turut bersama-sama gotong royong aka tetapi itu lebih sekedar sebagai anggota masyarakat, bukan kapasitas sebagai pengurus LPMK”(wawancara 5 oktober 2021)

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dengan informan tersebut, terjadi kontroversi yang mengatakan bahwa dari pihak LPMK turut menggerakkan partisipasi masyarakat, tetapi tanggapan dari masyarakat kebalikan

dari pernyataan yang disampaikan oleh pengurus LPMK, untuk mengklarifikasi data yang diperoleh, peneliti mewawancarai Lurah Lirung dan Lurah lirung 1 mengenai hal keterlibatan LPMK untuk menggerakkan partisipasi masyarakat.

- 1) Lurah lirung megatakan bahwa:
 - a. Apakah LPMK dilibatkan dalam perencanaan pembangunan di keluraan?

“sejauh ini ada karena, tiap Tahun tepatnya di bulan mei ada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), dan bulan agustus tepatnya hari Kemerdekaan NKRI kami dari pihak kelurahan melaksanakan kegiatan lomba seperti:

1. Bola voli antar KRT
2. Bola kaki antar KRT
3. Dan kegitan-kegiatan lainnya

di sutu LPMK harus di libatkan karena itu merupakan Tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengurus LMPK di kekurahan lirung.”

- b. Apakah LPM berpartisipasi dalam pembangunan di kelurahan?

“ada menurut kertampilan dan kemampuan dari pihak LMPK baik itu Ketua LPMK dan pengurus lainnya, pengurus LPMK hanya terlibat Ketika ada kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah kelurahan karena, hubungan kerja LPMK dengan pemerintah kelurahan hanya sebagai garis koordinasi”

- c. Apakah ada pengawasan dari pihak kelurahan terhadap kegiatan yang dilakukan LPMK di kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kelurahan?

“secara organisasi itu ada karena, dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan terbalik, LPMK yang mengawasi kegiatan pembangunan yang di lakukan di kelurahan (wawancara 4 oktober 2021)

2) Lurah lirung I mengatakan bahwa:

a. Apakah LPMK dilibatkan dalam perencanaan pembangunan di kelurahan?

“sejauh ini ada karena, tiap Tahun tepatnya di bulan oktober ada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), di situ LPMK harus di libatkan karena itu merupakan Tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengurus LPMK di kelurahan lirung I.”

b. Apakah LPMK berpartisipasi dalam pembangunan di kelurahan?

“ada menurut kertampilan dan kemampuan dari pihak LPMK baik itu Ketua LPMK dan pengurus lainnya, pengurus LPMK hanya terlibat Ketika ada kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah kelurahan karena, hubungan kerja LPMK dengan pemerintah kelurahan hanya sebagai garis koordinasi”

c. Apakah ada pengawasan dari pihak kelurahan terhadap kegiatan yang dilakukan LPMK di kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kelurahan?

“kalau secara organisasi itu ada karena, dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan terbalik, LPMK yang mengawasi kegiatan pembangunan

yang di lakukan di kelurahan Lirung I (wawancara 4 oktober 2021)

Ternyata penjelasan melalui informasi yang peneliti peroleh dari lurah sangat jelas mengatakan bahwa keterlibatan LPMK untuk menggerakkan masyarakat masih sangat kurang karena hubungan kerja LPMK dengan pemerintah Kelurahan hanya sebatas garis koordinasi, hal ini saya selaku peneliti coba untuk konfirmasi dengan pengurus LPMK khususnya ketua LPMK Lirung I yang sebelumnya memberikan informasi bahwa LPMK turut terlibat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, ditemukan informasi bahwa:

“keterlibatan LPMK untuk menggerakkan partisipasi masyarakat memang masih belum optimal, karena pada dasarnya LPMK hanya di butuhkan ketika ada kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah kelurahan karena hubungan kerja LPMK dengan pemerintah kelurahan hanya sebagai garis koordinasi”

Menanggapi hal tersebut, ternyata ada pengakuan dari pengurus LPMK dalam hal ini ketua LPMK Lirung bahwa peran untuk menggerakkan partisipasi masyarakat sudah mulai hilang, peneliti coba untuk menelusuri apa yang menjadi penyebab sampai hilangnya peran LPMK dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, diperoleh informasi dari Ketua LPMK bahwa:

“sudah banyak pengurus yang tidak aktif lagi, ada beberapa pengurus juga yang sudah tidak berdomisili di kelurahan Lirung , sehingga secara langsung hal ini turut mempengaruhi peran dari LPMK, disamping itu ada pula kendala seperti tidak tersedianya dana bagi kami LPMK untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah di percayakan kepada kami,

hal ini turut mempengaruhi semangat pengurus lainnya untuk bekerja”.

Dari hasil wawancara diatas, terungkap bahwa kelemahan LPMK dalam melaksanakan perannya lebih didasarkan pada hal klasik seperti tidak tersedianya dana, dan keaktifan dari setiap pengurus yang ada di Kelurahan Lirung maupun Kelurahan Lirung I.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Melaksanakan Dan Mengendalikan Pembangunan

Komponen ketiga yang berkaitan dengan peran LPMK adalah melaksanakan dan mengendalikan pembangunan (Pengawasan), Sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam pembangunan, sebenarnya LPMK dapat berperan dalam proses pengawasan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan. Sesuai dengan tugas pokoknya LPMK dapat memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terlibat.

Beberapa pernyataan yang berkaitan dengan peran LPMK dalam melaksanakan pengawasan pembangunan dapat dikemukakan sebagai berikut: wawancara di rumah informan, yang adalah sebagai pengurus LPMK Kelurahan Lirung I, (jemi pulu) mengatakan:

“kami sebagai pengurus LPMK dalam hanya sekedar ikut dalam setiap kegiatan yang diadakan di kelurahan, kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pihak kelurahan. Saya ikut kalau diberitahu atau diundang”

Senada dengan informan diatas, selaku pengurus LPMK Lirung I juga, mengemukakan:

“Memang belum ada program yang dilaksanakan di kelurahan ini yang merupakan program yang inisiatif pengusulannya berasal dari 3 pengurus LPMK. Pengurus LPMK

hanya ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk melakukan pengawasan, kami sebagai pengurus LPMK datang jika diundang untuk mengikuti suatu setiap kegiatan yang dilakuka di kelurahan.

Berbeda dengan informasi di atas, ketua LPMK Kelurahan Lirung I, dalam wawancara dengan peneliti, mengatakan bahwa:

“Pengurus LPMK pernah terlibat secara aktif dalam dalam mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan, Keterlibatan LPMK dalam program Musrembang.

Dalam hal penyampaian pendapat dalam pertemuan, partisi pengawasan pengurus LPMK masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan berikut, yang merupakan masyarakat yang ada di Kelurahan lirung I mengemukakan, bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan yang di lakukan di kelurahan lirung yang lebih banyak mengambil peran adalah Lurah.

Senada dengan pernyataan di atas, salah seorang tokoh masyarakat yang selalu ikut dalam kegiatankegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan mengemukakan bahwa:

“Peran lurah dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan masih sangat besar. Mungkin ini tidak tedepas dari kedudukan lurah, sehingga berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh lurah masih sangat menonjol di bandingkan dengan LPMK ”.(wawancara 5 oktober 2021)

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di kelurahan, inisiatifnya lebih banyak berasal dari lurah. Demikian pula dalam hal penyampaian gagasan dalam pertemuan-pertemuan yang

dilaksanakan masih didominasi oleh pemerintah kelurahan.

Penutup

1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat dari kurang berperannya pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana pihak LPMK tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama setiap kepala lingkungan, sehingga tidak efektifnya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh setiap kepala lingkungan kepada LPMK.
2. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat bahwa LPMK di kelurahan Lirung Dan Kelurahan Lirung I tidak proaktif terhadap pembangunan sehingga setiap pelaksanaan program pembangunan di kelurahan Lirung dan Kelurahan Lirung I di pihak ketigakan yaitu dialihkan pada kontraktor yang seharusnya menjadi kewenangan dari LPMK.
3. Rendahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lirung Dan Kelurahan Lirung I ini disebabkan oleh keaktifan pengurus LPM itu sendiri, dimana ada beberapa pengurus yang sudah tidak lagi berdomisili di Kelurahan Lirung Dan Kelurahan Lirung I, ditambah dengan rendahnya pengetahuan, keterampilan, keahlian sesuai dengan pekerjaan yang diembannya, motivasi pengurus, serta permasalahan klasik yaitu

tidak tersedianya dana operasional bagi LPM.

Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya peran LPMK, maka diperlukan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengurus LPMK dalam bentuk pelatihan dengan orientasi tugas pokok dan fungsi LPMK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah kecamatan agar setiap pengurus LPMK Kelurahan Lirung dan Kelurahan Lirung I memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya, dalam bentuk pendampingan.
2. Perlunya keterlibatan berbagai stakeholder (semua pihak dari masyarakat) pada berbagai level, baik ditingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten dalam program yang akan dilaksanakan, diharapkan akan dapat memberikan motivasi, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta mengubah persepsi pengurus sehingga dapat lebih berperan dalam kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memanfaatkan LPMK dalam setiap pembangunan yang dibutuhkan di Kelurahan Lirung dan Kelurahan Lirung I.
3. LPMK Kelurahan Lirung dan Kelurahan Lirung I harus didorong agar aktif dalam perencanaan, mengerakan partisipasi masyarakat serta melaksanakan dan menendalikan pembangunan di kelurahan dengan memberikan biaya operasional.

Daftar Pustaka

Aprillia Theresia, Krisnha dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat.,

- Alfabeta, Bandung.
- Arief, Hasrat, dkk. 2013, Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) dan Skripsi. Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Abe, Alexander, 2002, Perencanaan daerah partisipatif, pondok edukasi, Solo
- Duverger, Maurice, 1985, Sosiologi Politik, Rajawali, Jakarta.
- Mansyur, Radjab ., 2014 Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif. Jurusan Sosiologi FISIP Unhas
- Kunarjo, 2002, Perencana dan Pengendalian program Pembangunan, penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Koenjaraningrat. 1985. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Gramedia. Jakarta.
- Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah (2004) Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah, PT Gramedia Pustaka utama Jakarta
- Rauf, Rahyunir & Munaf, Yusri. 2015. Lembaga Kemasyarakatan Indonesia. Zanafala Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2003, Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan ke enam, Rajawali Grafindo, Jakarta.
- Sumaryadi, Nyoman, I, 2000, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, CV Cita Utama, Jakarta.
- Tjokroamidjoyo, Bintaro, 1996, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta